

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENGEDARAN UANG RUPIAH PALSU
(Studi Kasus Putusan PN No. 1648/Pid.B/2011/PN.Sby)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur



Oleh :

ANGKY ANGGRIAWAN SETYA IRDHANA

NPM. 0771010077

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2012

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN
UANG RUPIAH PALSU
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 1648/Pid.B/2011/PN/Sby)

Oleh:

ANGKY ANGGRIAWAN SETYA IRDHANA
NPM 0771010077

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur
Pada tanggal 22 Juni 2012

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Tim Penguji

1.

H. Sutrisno, SH., M. Hum
NIP/NPT 19601212 198803 1 001

H. Sutrisno, SH., M. Hum
NIP/NPT 19601212 198803 1 001
2.

Pembimbing Pendamping

Hariyo Sulistiyantoro, SH., MM
NIP/NPT 19620625 199103 1 001
3.

Yana Indawati, SH., MKn
NIP/NPT 37901070 224

Subani, SH., M. Si
NIP/NPT 19510504 198303 1 001

Mengetahui,
DEKAN

Haryo Sulistiyantoro, SH., MM
NIP/NPT 19620625 199103 1 001

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG RUPIAH PALSU

(Studi Kasus Pututsan Pengadilan Negeri No. 1648/Pid.B/2011/PN/Sby)

Oleh:

ANGKY ANGGRIAWAN SETYA IRDHANA
NPM 0771010077

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur
Pada Tanggal 15 Juni 2012

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Tim Penguji

1.

H. Sutrisno, SH., M. Hum
NIP/NPT 19601212 198803 1 001

H. Sutrisno, SH., M. Hum
NIP/NPT 19601212 198803 1 001
2.

Pembimbing Pendamping

Hariyo Sulistiyantoro, SH., MM
NIP/NPT 19620625 199103 1 001
3.

Yana Indawati, SH., MKn
NIP/NPT 37901070 224

Subani, SH., M. Si
NIP/NPT 19510504 198303 1 001

Mengetahui,
DEKAN

Haryo Sulistiyantoro, SH., MM
NIP/NPT 19620625 199103 1 00

PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN
UANG RUPIAH PALSU

Disusun oleh :

ANGKY ANGGRIAWAN SETYA IRDHANA
NPM : 0771010077

Telah Disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

SUTRISNO, SH., M.Hum
NIP. 196 201 212 198 803 1001

YANA INDAWATI, SH. MKn
NPT. 379 010 702 24

Mengetahui,

DEKAN

Haryo Sulistiyantoro, SH., MM
NIP. 19 510 554 198303 1001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Angky Anggriawan Setya Irdhana
Tempat/ Tanggal Lahir : Surabaya/ 14 Desember 1988
NPM : 0771010077
Konsentrasi : Pidana
Alamat : Jl. Rungkut Harapan A-25.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul :
“PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN
UANG RUPIAH PALSU” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat)

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (Plagiat) maka
saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar Keserjanaan (Sarjana
Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan
penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui
PEMBIMBING UTAMA

Surabaya, 13 Juni 2012
PENULIS

SUTRISNO, SH, M.Hum
NIP. 196 201 212 198 803 1001

ANGKY ANGGRIAWAN SETYA IRDHANA
NPM. 0771010042

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG RUPIAH PALSU (Studi Kasus Putusan PN No. 1648/Pid.B/2011/PN.Sby)".

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya penyusunan skripsi ini tidak dapat lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Haryo Sulistiyantoro, SH., MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
2. Bapak Sutrisno, SH., Mhum., selaku Wadek I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dan sekaligus Dosen Pembimbing Utama yang selalu memberikan pengarahan dan bimbingan selama mengerjakan skripsi.
3. Bapak Drs. E. C. Gendut Soekarno, M.S., selaku Wadek II Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional.
4. Bapak Subani.S.H., M.Si selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur .
5. Ibu Yana Indawati, SH,MKn, selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang selalu memberikan pengarahan dan bimbingan selama mengerjakan skripsi.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Bapak Sariyanto, SSos., Bapak Tauhid dan segenap pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Kasat Reskrim Polrestaes Surabaya khususnya Bapak Aiptu H. Soemarsono selaku staf Urbin Ops Polrestaes Surabaya yang telah membimbing saya selama penelitian dan pengumpulan data demi terciptanya skripsi ini.
9. Kasubnit Tipiter Satreskrim Polrestaes Surabaya Bapak Ipda Teguh Setiawan, SH
10. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
11. Kedua Orang Tua, Soewito Bapakku dan Sri Indah Ibuku yang telah memberikan dukungan moril maupun materil semangat serta doa dan curahan kasih sayang tanpa henti.
12. Kekasih saya Louvi Ana Santi, SE, yang tidak pernah lelah untuk memberi semangat dan memberi dukungan selama ini. Thank you for your support and motivation. Ini semua berkat kamu. Thank you.
13. Teman saya Zaki, Amik, Catur, terima kasih telah menemani saya mengerjakan penelitian skripsi ini, dan menemani saya untuk kesana-kemari di Surabaya ini.
14. Teman – teman seperjuangan yang telah menjadi saudaraku selama kuliah di sini khususnya Riezky, Wahana, Rigki, Abi, Agung, Rocbini Rosi, dan Deddy terimakasih banyak atas bantuannya selama ini. Seluruh Mahasiswa/I Fakultas

Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, yang telah membantu dan memberikan saran di dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari, bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan penuh keterbatasan. Dengan harapan bahwa skripsi ini Insya Allah akan berguna bagi rekan-rekan di Progam Studi Ilmu Hukum, maka saran serta kritik yang membangun sangatlah dibutuhkan untuk memperbaiki kekurangan yang ada.

Surabaya, Juni 2012

Penulis

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Angky Anggriawan SetyaIrdhana
NPM : 0771010077
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 14 Desember 1988
Program Studi : Pidana
Judul Skripsi :

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN
UANG RUPIAH PALSU

ABSTRAKSI

Uang adalah merupakan urat nadi kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, masih juga sering ditemui terjadinya beberapa perbuatan melanggar terkait dengan uang sebagai alat pembayaran yang sah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai alat untuk memperlancar proses pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui factor pendorong pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu dan bentuk pertanggungjawaban pelaku. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif yaitu merupakan penelitian hukum terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terutama yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Oleh karena itu dalam penelitian ini difokuskan pada faktor-faktor pendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana pengedaran uang palsu dan bentuk pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu. Hasilnya faktor-faktor pendorong pendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana pengedaran uang palsu adalah internal dan eksternal. Jika internal kelurga dan kemiskinan sedangkan eksternal pendidikan dan pergaulan. Analisis faktor yang paling dominan adalah faktor kemiskina. Bentuk pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu yaitu diancam pidana dalam pasal 244 KUHP yang berbunyi Barang siapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun serta menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 2 (dua tahun) 6 (enam) bulan.

Kata Kunci : Bentuk Pertanggungjawaban, Pengedaran,Uang Palsu

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN DI POLRESTABES SURABAYA
Lampiran II	: SURAT KETERANGAN HASIL WAWANCARA DENGAN KASUBNIT TIPITER POLRESTABES SURABAYA
Lampiran III	: PUTUSAN KASUS PENGEDARAN UANG PALSU
Lampiran IV	: SURAT DAKWAAN PENGEDARAN UANG PALSU
Lampiran V	: SURAT TUNTUTAN PENGEDARAN UANG PALSU

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seperti kita ketahui, bahwa fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan didalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaedah-kaedah dalam peraturan perundang-undangan itu harus dilaksanakan dengan tegas.

Asas kepastian hukum berfungsi agar warga masyarakat bebas dari tindakan pemerintah dan pejabatnya yang tidak dapat diprediksi dan sewenang-wenang. Implementasi asas ini menuntut dipenuhinya :

- Syarat legalitas dan konstitusionalitas, tindakan pemerintah dan pejabatnya bertumpu pada perundang-undangan dalam kerangka konstitusi.
- Syarat Undang-undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan.
- Syarat perundang-undangan hanya mengikat warga masyarakat setelah diundangkan dan tidak berlaku surut (Non Retroaktif).
- Asas peradilan bebas terjaminnya objektivitas, adil dan manusiawi.

- Asas bahwa Hakim tidak boleh menolak mengadili perkara dengan alasan hukum tidak ada atau tidak jelas.

Oleh karena itu, hukum mengatur kepentingan-kepentingan warga masyarakat dan hukum ditetapkan untuk suatu peristiwa yang terjadi di masa sekarang atau di masa yang akan datang, maka pelaksanaannya harus dijalankan dengan tegas sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam undang-undang untuk mencapai suatu kepastian hukum dan ketertiban di dalam masyarakat.

Pelaksanaan undang-undang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu sendiri. Ketertiban dan kenyamanan hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan apabila hukum itu dilaksanakan, karena memang hukum diciptakan untuk dilaksanakan.

Kalau hukum tersebut tidak terlaksana, maka hukum atau undang-undang itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat. Peraturan hukum atau undang-undang yang demikian akan mati dengan sendirinya.

Sejalan dengan pembangunan Nasional, maka uang adalah faktor yang sangat menunjang dalam mendorong keberhasilan pembangunan di segala bidang. Uang adalah sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran hutang-hutang. Dan juga sering dipandang sebagai kekayaan yang dimilikinya yang dapat digunakan untuk pembayaran sejumlah tertentu dengan kepastian dan tanpa penundaan waktu.

Jadi dalam hal ini uang adalah merupakan urat nadi kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, uang yang diterima oleh masyarakat sebagai penghasilan, upah atau gaji berupa honorarium, deviden dan sesuatu yang diterima dalam bentuk uang yang selanjutnya akan dipergunakan sebagai investasi. Dengan demikian terjadilah suatu sirkulasi yang terus menerus dan berlanjut dalam pengeluaran dan penerimaan uang. Hal ini berarti uang memegang peranan penting dalam kehidupan.

Dalam kehidupan masyarakat, masih juga sering ditemui terjadinya beberapa perbuatan melanggar terkait dengan uang sebagai alat pembayaran yang sah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai alat untuk memperlancar proses pembangunan. Tentu saja adanya gangguan dan hambatan tersebut akan mempengaruhi pula pada kelancaran jalannya pembangunan Nasional. Oleh karena itu, setiap tindakan atau perbuatan yang bersifat atau berpengaruh terhadap fungsi uang perlu dilakukan penindakan tegas dan dikenai sanksi yang berat. Sehingga dengan demikian setidaknya tidaknya akan menjadi pelajaran dan menjadi jera, terutama ditunjukkan kepada pihak-pihak yang beritikad tidak baik dan bertindak serupa.

Salah satu yang menjadi bahan pengamatan dalam penulisan skripsi ini adalah tindakan atau perbuatan yang secara sengaja dan melawan hukum atas uang tersebut. Konkritnya terhadap tindakan atau perilaku tindak pidana dengan jalan mengedarkan uang palsu atau uang yang dipalsukan.

Tindak pidana dengan jelas mengedarkan uang palsu tersebut, tidak lain merupakan tindak berlanjut atau setidaknya tidaknya bila dilihat dari proses

terjadinya suatu tindakan pemalsuan uang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dengan sengaja melawan hukum untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya guna kepentingan sendiri, atau dengan cara bersama-sama dengan pihak lain.

Tindak pidana dalam melakukan mengedarkan uang palsu, merupakan upaya lanjutan dari tindak pidana pemalsuan uang. Tindak pemalsuan atau pembuatan guna mengadakan atau perubahan pada uang yang adasaat ini, baik mengenai bahan maupun mengenai tulisannya. Misalnya uang yang berbeda nilainya tetapi hampir sama bentuknya kecuali cetakan atau tulisan nilai nominalnya yang berbeda. Sehingga bagaimanapun juga perubahan terhadap nilai nominal tersebut adalah tindakan pemalsuan. Kesengajaan terlihat pada perbuatan meniru, yaitu membuat sesuatu yang menyerupai uang yang berlaku. Dengan kesengajaan tersebut, tidak lain menjadi tujuan dengan maksud untuk mengedarkannya.

Melihat hukuman yang di ancamkan demikian beratnya, hal ini berarti bahwa betapa beratnya sifat dari tindak pidana pemalsuan uang atau mengedarkannya uang palsu atau dengan cara menyuruh mengedarkannya. Tindak pidana membuat uang palsu atau sejenisnya yang dipalsukan mempunyai tindak pidana yang berbeda dibandingkan dengan tindak pidana pemalsuan dengan cara mengedarkan.

Di samping individu yang menjadi korban juga sebagian masyarakat pada umumnya menerima kerugian diedarkannya uang palsu tersebut. Makin banyaknya uang palsu yang beredar, berarti peredaran uang itu

menunjukkan peningkatan dalam jumlah, sehingga dalam hal ini akan berakibat terjadinya inflasi yang akan berakibat naiknya harga barang di pasaran yang sebenarnya tidak dikehendaki. Disisi lain, mungkin dapat membrikan kenaikan pekapita masyarakat akan tetapi sesungguhnya keadaan yang demikian hanyalah semu belaka, sehingga tidak dapat dipungkuri lagi maka pada akhirnya terciptalah suatu keadaan yang tidak stabil dalam perekonomian di masyarakat.

Berbagai jenis perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHP dan KUHAP. Berhubung tujuan jahat dianggap terlalu luas, harus diisyaratkan, bahwa pelaku harus mempunyai ” niat atau maksud ” untuk menciptakan anggapan atas sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli atau benar.

Suatu perbuatan pemalsuan dapat dihukum apabila terjadi perkosaan terhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal mana :

- a. Pelaku mempunyai niat/maksud dengan menggambarkan keadaan yang tidak benar itu seolah-oleh benar mempergunakan sesuatu data yang tidak asli seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa data tersebut adalah benar dan asli dan karenanya orang lain terperdaya.
- b. Unsur niat/maksud tidak perlu meliputi unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan.
- c. Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diajukan beberapa permasalahan yang dapat menjadi pokok bahasan. Permasalahan-permasalahan tersebut apabila dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Faktor – faktor apa yang menjadi pendorong pelaku untuk melakukan Tindak pidana pengedaran uang palsu?
2. Bagaimanakah bentuk pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tentang faktor – faktor yang mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana pengedaran uang palsu.
2. Mengetahui tentang bentuk pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu.

1.4 Lokasi Penelitian

Penulis menyusun penelitian skripsi yang berjudul tentang Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Rupiah ini berlokasi di Polrestaes Surabaya.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu dan Faktor – faktor pendorong pelaku

untuk melakukan Tindak Pidana pengedaran uang palsu.

2. Manfaat Teoritis

Sebagai referensi dan informasi di fakultas hukum dan diharapkan sebagai sumbangan pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan hukum, agar ilmu itu tetap hidup dan berkembang khususnya tentang tindak pidana pengedaran uang palsu.

1.6 Kajian Pustaka

1.6.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari suatu istilah dalam hukum belanda yaitu strafbaarfeit. Ada pula yang mengistilahkan menjadi delict yang berasal dari bahasa latin delictum. Hukum pidana negara Anglo Saxon memakai istilah offense atau criminal act.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa melanggar larangan tersebut.¹ Larangan tersebut ditujukan pada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejadian itu. Moeljatno memisahkan antara criminal act dan criminal responsibility yang menjadi unsur tindak pidana. Menurut moeljatno hanya lah unsur – unsur yang melekat pada criminal act (perbuatan yang dapat dipidana). Sedangkan yang termasuk unsur – unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang – undang bersifat melawan hukum.

¹ Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 59

Unsur-unsur perbuatan pidana terdapat tiga unsur yaitu :

1. Unsur Undang-Undang dan yang di Luar Undang-Undang

Suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik tidak dapat dijatuhi pidana. Akan tetapi, hal itu juga tidak berarti bahwa perbuatan yang tercantum dalam rumusan delik selalu dapat dijatuhi pidana. Untuk itu, diperlukan dua syarat, yaitu perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Dengan demikian, rumusan pengertian “perbuatan pidana” menjadi jelas, yaitu perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.

2. Sifat Melawan hukum atau Kesalahan sebagai Unsur Undang-Undang

Lain halnya jika perbuatan yang ditetapkan oleh ketentuan pidana biasanya sah dan tidak sahnya merupakan perkecualian. Hanya perkecualian itulah yang patut dipidana. Sebagai contoh adalah perusakan. Sengaja merusak barang milik orang lain terjadi hampir setiap hari tanpa bersifat melawan hukum, misalnya perusakan rumah. Dalam menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampau luas.

3. Unsur Tertulis dari Rumusan Delik atau Alasan Penghapusan Pidana

Dalam suatu ketentuan pidana, pembentukan undang-undang tidak selalu merumuskan perbuatan yang dapat dipidana saja. Kadang-kadang ditambahkan dengan penyebutan keadaan dimana melakukan perbuatan itu

tidak dipidana. Jadi, pembentuk undang-undang menambahkan alasan penghapusan pidana ini hanya dapat digunakan kalau perbuatan itu telah dilakukan dan kalau terjadi keadaan khusus yang dicantumkan dalam alasan penghapusan pidana tersebut. Sebagai contoh, pasal 310 KUHP menyebutkan bahwa :

“Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”

Menurut Simons yang menggunakan istilah peristiwa pidana adalah perbuatan atau tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang – undang bertentangan dengan hukum dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Simon memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana dan tidak memisahkan unsur yang melekat pada aliran tindak pidana (pertanggungjawaban pidana). Kemudian Simon menyebut unsur – unsur tindak pidana, yaitu perbuatan manusia diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Unsur – unsur tersebut oleh Simon dibedakan antara unsur objektif dan unsur subjektif. Yang termasuk unsur objektif adalah perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, dan kemungkinan adanya keadaan tertentu yang menyertainya. Unsur subjektif adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan.

1.6.2 Faktor-Faktor Pengedaran Uang Palsu

Perbuatan pidana tentu disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor dimana satu saja masih tidak dapat atau tidak cukup menghasilkan tindak pidana. Diantara beberapa faktor tersebut diantara satu dengan faktor yang lain saling mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan. Demikian pula dengan terjadinya pengedaran uang palsu yang dilakukan oleh seseorang banyak sekali yang mempengaruhinya, misalnya;

1. Faktor lingkungan keluarga.
2. Faktor lingkungan sosial.
3. Faktor keadaan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
4. Faktor kecanggihan elektronika yang bisa mencetak uang palsu dengan sedemikian rupa adanya.

1.6.3 Macam-Macam Tindak Pidana

Macam-macam tindak pidana dibagi dalam 2 bentuk :

1. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum adalah semua tindakan pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. (Buku II dan Buku III KUHP).

2. Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut. Misalnya tindak pidana korupsi (UU No 31 Th. 1999), tindak pidana psikotropika (UU No. 10 Th. 1988), tindak pidana narkotika (UU No. 22 Th. 1977).²

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, RajaGrafindo, Jakarta, 20011, hal 131

1.6.4 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut.

- 1) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
- 2) Menurut cara rumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formell delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiell delicten*);
- 3) Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);
- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissions*);
- 5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjamin dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
- 6) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- 7) Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (*delicta communis*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu);
- 8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
- 9) Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*);
- 10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;
- 11) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).³

³ Ibid , hal 121

1.6.5 Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Kelakuan dan akibat (= perbuatan)
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum objektif
5. Unsur melawan hukum subyektif⁴

1.6.6 Syarat-Syarat Terjadi Tindak Pidana

Dijelaskan bahwa suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Maka, sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum. Tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.

Penyebutan sifat melanggar hukum dalam pasal-pasal tertentu ini menimbulkan tiga pendapat tentang arti dari melanggar hukum ini, yaitu diartikan :

Ke-1 : bertentangan dengan hukum (objektif);

Ke-2 : bertentangan dengan hak (subyektif) orang lain;

Ke-3 : tanpa hak⁵

Bahwa istilah melanggar hukum dalam suatu pasal harus diartikan lain daripada dalam pasal lain, seperti yang dikemukakan oleh Riphagen,

⁴ Prof. Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Renika Cipta, Jakarta, 2009, hal 64

⁵ Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal 1-3

menurut hemat saya mungkin saja. Ini praktis bergantung kepada apa yang dibayangkan oleh pembentukan undang-undang, dan kepada apa yang dirasakan oleh para pelaksana hukum sebagai hal yang terbaik dalam situasi tertentu.⁶

1.6.7 Kejahatan Pemalsuan

Suatu pergaulan hidup di dalam masyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa ada jaminan akan kebenaran atas beberapa bukti surat dan atas alat tukarnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Perbuatan pemalsuan ternyata merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap 2 (dua) norma dasar :

- a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
- b. Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap Negara/ketertiban umum.⁷

Akan terjadi suatu kericuhan apabila terjadi pemalsuan yang mana merupakan salah satu bentuk dari penipuan yang merugikan orang lain. Tidak banyak masyarakat yang mengerti akan adanya suatu pemalsuan apabila tidak ada bukti konkrit didalamnya. Karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya teknologi informasi yang bisa dipelajari untuk dapat membuka wawasan masyarakat tersebut agar dapat membedakan mana suatu hal yang

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal 1-3

⁷ Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hal 155

dipalsukan atau benar – benar konkrit atau asli.

Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal didalam suatu masyarakat yang sudah maju, dimana surat, uang logam, merk atau tanda tertentu dipergunakan untuk mempermudah lalu-lintas hubungan didalam masyarakat.

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan “Penipuan”, hingga tidak semua perbuatan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas barang seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya keaslian atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat tersebut adalah benar atau asli.

Peningkatan penggunaan berbagai barang, tanda, tulisan yang jaminan kasliannya/kebenarannya dibutuhkan oleh masyarakat, mengakibatkan timbulnya pemalsuan. Dan peningkatan permintaan akan barang-barang kebutuhan hidup akan menambah kemungkinan terjadinya perbuatan pemalsuan tidak hanya atas barangnya sendiri tetapi juga terhadap merk, tanda dan suratnya yang di butuhkan untuk memberikan jaminan akan kebenaran, keaslian atas asal barang tersebut.

Suatu perbuatan pemalsuan dapat dihukum apabila terjadi perusakan secara paksa terhadap jaminan/kepercayaan dalam hal mana :

- a. Pelaku mempunyai niat/maksud dengan menggambarkan keadaan yang tidak benar itu seolah-olah benar mempergunakan ssuatu barang

yang tidak asli seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang tersebut adalah benar dan asli dan karenanya orang lain terpedaya.

- b. Unsur niat/penipuan tidak perlu meliputi unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan).
- c. Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum, yang khusus dalam pemalsuan tulisan/surat dan sebagainya, dirumuskan dengan mensyaratkan “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat dari pada tulisan/surat tersebut.⁸

1.6.8 Jenis-Jenis Pemalsuan

Menurut KUHP pemalsuan dibagi dalam beberapa jenis meliputi :

1. Sumpah palsu (Bab IX).
2. Pemalsuan mata uang dan uang kertas Negara serta uang kertas Bank (Bab X).
3. Pemalsuan materai dan merek / Cap (Bab XI).
4. Pemalsuan Surat (Bab XII).

1.6.9 Pengertian Uang

Pengertian uang menurut Van Hove adalah suatu benda yang dipergunakan dan diterima secara umum sebagai alat untuk penukaran dan standart pengukur nilai, standart daya beli dan standart utang piutang.

Uang adalah alat tukar yang sah dan terdiri atas semua jenis mata uang yang dibuat oleh Pemerintah berdasarkan undang-undang.⁹

Jadi definisi uang adalah segala sesuatu yang umum di terima sebagai alat tukar barang lain pada daerah tertentu.

Di negara indonesia, bentuk uang terdiri dari :

⁸Ibid , hal 1157

⁹*Ibid*, hal 163

a. Uang Chartal

Yaitu alat-alat pembayaran yang dipastikan dan dikeluarkan oleh pemerintah dan setiap orang diharuskan menerimanya sebagai alat pembayaran yang sah. Uang chartal yang dikenal adalah dalam bentuk uang kertas (satuan pembayaran besar yang dikeluarkan bank sentral), uang kertas kecil dan uang receh (uang kecil yang dikeluarkan negara).

b. Uang Giral

Yaitu yang disebut bank, uang pembukuan, atau uang kredit, merupakan suatu tagihan pada sebuah bank atau dinas giro yang dipakai sebagai alat pembayaran. Uang giral merupakan bentuk abstrak uang yang bertolak dengan uang chartal.

Beberapa pengertian yang dijumpai dalam Bab IX ini perlu difahami, sebagai berikut :

a. Mata uang

Uang yang dibuat dari logam/emas, perak, nikel, tembaga dan sebagainya.

b. Uang kertas

Uang yang dibuat dari kertas dan dikeluarkan oleh Pemerintah.

c. Uang kertas bank

Uang yang dibuat dari kertas dan dikeluarkan oleh Bank sirkulasi, Bank mana dipecaya oleh Pemerintah untuk mengeluarkannya.¹⁰

Maka bila kita perhatikan mengenai pemalsuan mata uang, maka obyek pemalsuannya terdapat dalam Pasal 244 KUHP antara lain :

1) Uang negara atau mata uang

2) Uang kertas negara

¹⁰ *Ibid, hal 163*

3) Uang kertas bank

Ketentuan-ketentuan pidana terhadap peraturan uang ini dimaksudkan guna perlindungan terhadap kepentingan hukum yang terdiri atas kepercayaan masyarakat atas sebagai alat pembayaran yang sah. Sehubungan dengan jenis pemalsuan uang ini, harus dikemukakan azas universaliteit yang dianut oleh KUHP pasal 4 buku ke-dua azas mana bertujuan untuk pelaksanaan pemberantasan kejahatan pemalsuan uang secara internasional¹¹.

Pemalsuan mata uang merupakan salah satu pelanggaran terhadap jaminan-jaminan yang diakui oleh negara sebagai pelanggaran yang ditujukan terhadap ketertiban umum, dimana terhadap pelanggaran ini diancam dengan hukuman pidana.

Untuk lebih jelasnya kita perhatikan bunyi pasal 244 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas mata negara atau uang kertas bank, dengan maksud untuk menjalankan mata uang atau uang kertas Negara atau mata uang bank dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun”

Jadi menurut Pasal 244 KUHP ini adalah sebagai berikut :

1. Pembuat uang palsu itu sendiri, yang mempunyai nilai atau sengaja membuat, meniru, memalsukan mata uang atau uang kertas bank.
2. Memasang semata-mata meniru dan memalsukan mata uang, dimana uang palsu tersebut untuk diedarkan sendiri atau menyuruh orang lain untuk mengedarkan uang palsu yang telah dibuatnya.

¹¹ *Ibid*, hal 163

Dalam pasal 244 KUHP di atas mempunyai unsur-unsur antara lain:

- 1) Unsur obyektif
 - a. Meniru, atau
 - b. Memalsukan mata uang kertas bank atau uang kertas
 Maksudnya ialah meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas atau uang kertas bank. Pengertian meniru atau memalsukan mata uang ini telah dikemukakan tersebut di atas.
- 2) Unsur subyektif
 - a. Mengedarkan mata uang atau uang kertas atau uang kertas bank.
 - b. Menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas atau uang kertas bank itu sebagaimana yang asli atau yang tiada dipalsukan.

Maksudnya ialah si pemalsu mempunyai niat untuk mempergunakan mata uang atau uang kertas atau uang kertas bank yang ia buat itu didalam lalu-lintas pembayaran, baik olehnya sendiri maupun orang lain. Tanpa maksud atau niat perbuatan meniru atau memalsukan uang itu tidak dapat dikenai pidana, karena alat tukar tersebut tidak ada pelanggaran terhadap kepercayaan.

Sedangkan dalam pasal 245 KUHP berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang asli yang tidak dipalsukan, yakni mata uang atau uang kertas bank ditiru atau yang diketahuinya palsu atau dipalsukan, atau barangsiapa menyimpan atau memalsukan ke Negara Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang demikian, dengan maksud akan mengedarkan uang, menyuruh mengedarkan serupa dengan yang asli dan yang tidak dipalsukan, dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Dari uraian di atas perbuatan mengedarkan dapat ditafsirkan menggunakan uang itu untuk alat dalam lalu-lintas pembayaran. Dimana dari uang palsu tersebut dari si pembuat atau si pelakunya dapat berpindah ke tangan orang lain, maka akan banyak orang yang tertipu. Maka hal ini akan merusak stabilitas perekonomian di dalam suatu negara, bahkan perbuatan

mempergunakan kembali uang palsu setelah menerimanya termasuk juga dalam pengertian mengedarkan. Seperti yang telah terecantum dalam Pasal 245 KUHP yang telah penulis kemukakan di atas.

Maksud dalam Pasal 245 KUHP adalah sebagai berikut :

- 1) Yang lebih diutamakan dalam Pasal 245 KUHP ini adalah pelaku pengedar uang palsu dan menyimpan yang palsu tersebut, jadi si pelaku tidak harus membuat uang palsu.
- 2) Pelaku telah menerima uang palsu dari orang lain, lalu ia edarkan atau menyimpannya.
- 3) Juga pelaku sengaja atau mempunyai niat untuk menyimpan dan memasukkan uang palsu ke wilayah Republik Indonesia.

Dari bunyi Pasal 245 KUHP di atas dapat ditarik mengenai unsur-unsurnya antara lain :

1) Unsur obyektif

- a. Mengedarkan mata uang atau mata uang kertas atau uang keertas bank yang ditiru atau dipalsukan sendiri.
- b. Mengedarkan mata uang atau uang kertas atau uang kertas bank yang pada waktu penerimaannya diketahui palsu atau dipalsukan sebagai mata uang atau uang kertas bank asli dan tidak dipalsukan. Maksudnya ialah menyimpan atau memasukkan ke daaerah Republik Indonesia mata uang atau uang kertas bank palsu atau yang dipalsukan.

2) Unsur subyektif

- a. Dengan sengaja
Maksutnya ialah untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai yang asli dan tidak dipalsukan.
Di dalam Pasal 245 KUHP perbuatan-perbuatan yang dilarang, yaitu:
- b. Perbuatan mengedarkan uang palsu
- c. Perbuatan menyimpan persediaan uang palsu dan perbuatan memasukkan uang palsu ke wilayah Indonesia untuk diedarkan
- d. Perbuatan meniru atau perbuatan memalsukan sendiri
- e. Melakukan penerimaan dari orang lain, pada saat penerimaan ia mengetahui bahwa uang yang diterimanya adalah palsu

Apabila pemalsuan menyuruh mengedarkan dalam hal ini memperlak orang lain sebagai pengedar uang palsu itu, berarti di sini ada 2 (dua) pihak

yaitu pemalsuan dan mngedarkan uang palsu.

Dari maksud Pasal 245 KUHP di atas mengenai kata-kata sebagai yang asli dan tidak dipalsukan adalah sebagai yang palsu, yang mana uang palsu tersebut diedarkan seakan-akan uang asli. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan penyimpanan berarti persediaan uang palsu, yang mana barang itu ada dalam kekuasaannya. Jadi yang diprioritaskan dalam Pasal 245 KUHP ini adalah pelaku yang mengedarkan dan menyimpan uang palsu tersebut, oleh sebab itu pelaku tidak harus orang yang membuat uang palsu.

Seperti dalam ketentuan pidana terhadap peraturan uang yang dimaksudkan guna memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum yang terdiri atas kepercayaan masyarakat alat pembayaran yang sah yaitu uang.

1.6.10 Pertanggung Jawaban Pidana

Perbuatan pidana hanya menunjukan kepada dilarang dan di ancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Sebab asas dalam prtanggungjawaban dalam hukum pidana: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum tidak tertulis yang juga di indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Di sana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.

Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van materiele feit* (*fait materielle*). Dahulu

dijalankan atas pelanggaran tetapi sejak adanya arrest susu dari HR 1969 Nederland, hal itu ditiadakan. Juga bagi delik-delik jenis overtrendingen, berlaku asas tanpa kesalahan, tidak mungkin dipidana. Dalam buku-buku belanda yang pada umumnya tidak mengadakan pemisahan antara dilarangnya perbuatan dan dipidananya orang yang melakukan perbuatan tersebut (*strafbaar heid van het feit/strafbaarheid van de persoon*), dalam istilahnya *strafbaar feit*, hubungan antara perbuatan pidana dan kesalahan dinyatakan dengan hubungan antara sifat melawan hukumnya perbuatan (*wederrechtelijkheid* dan *ksalahan (schuld)*). Dikatakan bahwa *schuld* tidak dapat dimengerti tanpa adanya *wederrechtelijkheid*, tetapi sebaliknya *wederrechtelijkheid* mungkin ada tanpa adanya *ksalahan*. (Pompe hlm.88; Vos hlm 84).

Menurut Moeljatno orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana. Orang yang tidak dapat dipersalahkan melanggar sesuatu perbuatan pidana tidak mungkin dikenakan pidana, sekalipun banyak orang mengerti.

Dengan demikian ternyata, bahwa orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu tertentu melakukan perbuatan pidana. Kecuali itu, orang juga dapat di cela karena melakukan perbuatan pidana, jika dia, meskipun tidak sengaja dilakukan, tetapi terjadinya perbuatan tersebut dimungkinkan karena dia alpa atau lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang dalam hal tersebut, yang oleh masyarakat

dipandang seharusnya dijalankan olehnya. Di sini celaan tidak berupa kenapa melakukan perbuatan padahal mengerti (mengetahui) sifat jeleknya perbuatan seperti dalam hal kesengajaan, tetapi berupa kenapa tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang seharusnya (sepatutnya) dilakukan olehnya dalam hal itu, sehingga karenanya masyarakat di rugikan. Di sini perbuatan dimungkinkan terjadi kealpaan dan kelalaian. Selain dari dua hal di atas orang juga dapat melakukan perbuatan pidana padahal tidak mungkin dikatakan bahwa ada kesengajaan atau kealpaan, sehingga dia tidak dapat dicela apa-apa.

Kesalahan adalah keadaan psikis yang tertentu pada orang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Dan ucapan ini ternyata bahwa untuk adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal disamping melakukan perbuatan pidana.

Pertama : adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu, dan

Kedua : adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi.

Di sini yang pertama-tama harus diajukan adalah bahwa di dalam kebanyakan KUHP negara-negara lain ada ditentukan bahwa terhadap anak di bawah umur yang tertentu, misalnya 10 tahun, tidak dapat diajukan tuntutan pidana. Maksudnya ialah, dengan demikian terhadap anak-anak di bawah 10 tahun dimungkinkan penuntutan, tidak supaya dipidana, tetapi diadakan tindakan. Akibat daripada perbaikannya adalah sebagai berikut:

Pertama: Dengan hilangnya batas umur tersebut, tidaklah berarti bahwa anak-anak dibawah umur tersebut, sekalipun belum dapat membedakan antara perbuatan yang baik dengan yang buruk harus dipadana. Sebab pada pertamanya pasal 37(44KUHP) juga berlaku bagi kanak-kanak, sehingga terhadap anak-anak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit harus dikecualian dan pertanggung jawab. Tetapi pasal tersebut tidak dapat digunakan atas dasar umur yang masih sangat muda saja.

Kedua: Terhadap anak-anak itu tentunya lebih cepat dianggap tidak ada kesengajaan/kealpaan daripada orang dewasa.

Ketiga: Kalau memang anak tersebut belum cukup mempunyai penginsafan tentang makna perbuatannya, maka atas dasar tidak dipidana jika tidak ada kesalahan dia dapat dikecualikan. Jadi, tidak dapat dipidananya anak yang demikian itu tidak didasarkan atas suatu pasal dalam wet, melainkan atas hukum yang tidak tertulis.

Sebaliknya, kalau keadaan jiwanya tidak normal, fungsinya juga tidak baik, sehingga ukuran-ukuran yang berlaku dalam masyarakat tidak baik sesuai baginya. Bagi mereka tidak ada guna diadakan pertanggungjawaban. Mereka harus dirawat atau dididik dengan cara yang tepat. Bahwa mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan, dinyatakan dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya, atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”

1.7 Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan.¹²

Penelitian merupakan suatu saran (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.¹³

1.7.1 Pendekatan Masalah

Menggunakan pendekatan normatif, tinjauan yuridis normatif yang dengan melakukan identifikasi terhadap isu – isu hukum yang kurang berkembang dalam masyarakat, mengkaji penerapan – penarapan hukum dalam masyarakat, mengkaji pendapat para ahli – ahli hukum terkait dan analisa kasus dalam dokumen – dokumen untuk memperjelas hasil penelitian kemudian ditinjau aspek praktis dan aspek akademis keilmuan hukumnya dalam penelitian hukum.

1.7.2 Sumber Bahan Hukum

¹² Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 38

¹³ Soekanto, Suryono, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 1

Sumber bahan hukum primer

Konsep – konsep hukum yang berkaitan dengan Pemalsuan Uang yang mengatur tentang tindak pidana virtual yang tercantum di dalam :

- a. Undang – Undang nomor 6 tahun 1981 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Pemberantasan Uang Palsu
- b. KUHP
- c. KUHAP

Sumber bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang diambil dari pendapat atau tulisan para ahli dalam bidang Pemalsuan Uang untuk digunakan dalam membuat konsep – konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian ini dan dianggap sangat penting.

1.7.3 Pengumpulan Bahan Hukum

Dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan hukum melalui alat bantu catatan untuk dapat digunakan sebagai landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan para ahli sehingga dapat diperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan resmi oleh pihak yang berkompeten dalam bidang Pemalsuan Uang.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengkaji literatur – literatur yang berkaitan, pendapat para ahli – ahli hukum terkait dan analisa kasus dalam dokumen – dokumen untuk memperjelas hasil penelitian. Selain itu juga digunakan pendekatan undang –

undang terkait dengan Pemalsuan Uang yaitu undang – undang nomor 6 tahun 1981.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini nantinya akan disusun dalam empat bab. Tiap-tiap bab dibagi beberapa sub bab yang saling mendukung. Bab-bab yang tersusun tersebut nantinya merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain.

Bab pertama pendahuluan, bab ini merupakan gambaran secara umum menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini serta pertanggung jawaban sistematika. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada pembaca agar dapat mengetahui secara garis besar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Bab kedua menguraikan mengenai rumusan masalah yang pertama yaitu, membahas mengenai faktor-faktor pendorong pelaku untuk melakukan Tindak Pidana penyebaran uang palsu. Bab ini terdiri atas tiga sub bab. Sub bab yang pertama membahas tentang faktor-faktor internal pendorong pelaku Tindak Pidana pengedaran uang palsu. Sub bab yang kedua membahas tentang faktor-faktor eksternal pelaku Tindak Pidana pengedaran uang palsu. Sub bab yang ketiga menganalisa tentang faktor-faktor pendorong pelaku Tindak Pidana pengedaran uang palsu.

Bab ketiga menguraikan mengenai rumusan masalah yang kedua

yaitu bagaimanakah bentuk pertanggung jawaban pelaku Tindak Pidana pengedaran uang palsu. Bab ini terdiri atas tiga sub bab dengan penjelasannya. Sub bab pertama membahas mengenai kronologi kasus pengedaran uang palsu (studi kasus putusan PN no. 1648/Pid.B/2011/PN.SBY). Dan Sub bab kedua membahas bagaimana bentuk pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu (putusan PN no. 1648/Pid.B/2011/PN.SBY). Sub bab yang ketiga menganalisa tentang pertanggung jawaban tindak pidana pengedaran uang palsu.

Bab keempat penutup merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya dan juga berisikan saran dari permasalahan tersebut. Dengan demikian bab penutup ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang di angkat dalam penulisan skripsi ini